



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 10 Januari 2012

Halaman: 28

:: agenda kota ::

Komitmen Wujudkan Good Governance

Selama dua tahun berturut-turut, laporan penggunaan anggaran Pemkot Yogyakarta memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini tidak hanya mandeg sampai di situ. Untuk mempertahankan predikat tersebut, Pemkot baru-baru ini menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi DIY.

Kerja sama dilakukan bukan hanya untuk mempertahankan predikat opini dari BPK tadi, melainkan pula untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Condro Imantoro meresmikan kerja sama itu di kantor BPKP setempat, Jumat (6/1) lalu. Hadir dalam penandatanganan kerja sama Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono, Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta Wahyu Widayat, dan beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Yogyakarta.

Kerja sama dilakukan karena BPKP merupakan lembaga yang memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah. Serta memiliki kewenangan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang selama ini telah mulai diterapkan di lingkungan



Pemkot Yogyakarta.

Menurut Haryadi, kerja sama antara Pemkot dan BPKP tersebut sesuai dengan amanah undang-undang. "Jadi bukan hanya untuk menjaga keharmonisan kedua belah pihak, tetapi BPKP tetap dalam koridor menjaga agar Pemkot menjalankan *clean and good government*," terangnya.

Dijelaskan, dengan kerja sama tersebut, predikat opini WTP yang diperoleh Pemkot dari BPK yang merupakan standar pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut, jangan sampai turun. Pasalnya mempertahankan predikat jauh lebih sulit daripada mencapainya.

Salah satu cara untuk mempertahankan ini adalah dengan kerja sama tersebut.

"Melalui kerja sama ini, Pemkot akan terus bekerja keras agar predikat ini tetap dipertahankan. BPKP akan memberikan pembinaan dan mengingatkan kita agar kita tetap

di jalur yang benar," tambahnya.

Kerja sama dengan BPKP berlaku hingga lima tahun ke depan. Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Condro Imantoro mengatakan, kerja sama ini merupakan bukti langkah proaktif Wali Kota Yogyakarta beserta jajarannya untuk terus meningkatkan penerapan tatakelola pemerintahan yang baik.

Hal tersebut dianggap penting karena di masa mendatang, Pemkot Yogyakarta akan menghadapi banyak perubahan dan tuntutan yang lebih kompleks. "Karenanya, dibutuhkan komitmen yang konsisten

untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi berkelanjutan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Pemkot Yogyakarta," tandasnya.

Diakui, setelah penandatanganan kerja sama itu, segera disusun rencana aksi yang jelas, terjadwal, dan akuntabel. Dengan begitu, kerja sama tersebut bukan hanya sekadar di atas kertas tetapi merupakan komitmen dan tindakan nyata Pemkot Yogyakarta untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat menegaskan, BPKP akan melakukan pembinaan dan menjadi lembaga konsultan terhadap penyelenggaraan tata kelola yang baik bagi Pemkot Yogyakarta. "Salah satunya adalah pembinaan dalam SPIP," terangnya.

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi
1. <u>Bag. P3ADK</u>
2. <u>Inspektorat</u>
3.
4.
5.

- ✓ Positif
- ✓ Biasa
- ✓ Untuk diketahui



Tiri

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005